KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

#							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 5 0 2  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : 68 807 613 2 722 000							
A.2 NIK : \[							
	: HADIJAH						
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	4.547.300	4.547.300	0	5	227.365	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen  Nama Dokumen  Faktur Pajak  Tanggal  Z 5 dd  D 2 mm  Z 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor:  Tanggal  Dekumen Referensi : Nomor Dokumen  Faktur Pajak  Tanggal  D dd  Mm  Wyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instar	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID Subunit (	Organisasi :				ШШ		
C.4 Tanggal :		2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan	Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	t mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

H90SF1H3